



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO



RENCANA KERJA AWAL (RENJA) TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Perencanaan Kinerja adalah aktifitas pengambilan keputusan didepan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan monitor pencapaiannya. Rencana Kerja

Tahun 2024 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo menyusun Renja tahun 2024 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2024 merupakan gambaran usulan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 yang berdasarkan hasil analisis masalah dan capaian serta kinerja yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan tidak menyampingkan dengan tolak ukur dan target kinerja capaian program yang sudah ditentukan. Kami menyadari bahwa penulisan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Renja ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan dan Tim Penyusun Renja yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renja ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Dokumen Renja yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya

Tilamuta, Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo,



Ir. ASRA UMAR MURAD

NIP. 19680928 200012 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	24
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.1.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah	47
3.1.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.2. Program dan Kegiatan	47
3.3. Telaah Terhadap Kebijakan	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V. PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan akhir rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan akhir Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan akhir Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan akhir Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rancangan akhir Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rancangan akhir Renja OPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua 2023 - 2026 yang masuk dalam perodesasi RPJPD tahun 2011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Rancangan Awal Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD 2023 - 2026. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di Urusan Pilihan / Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan, dalam penyusunan Rancangan akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 juga berpedoman pada dokumen penunjang perencanaan opd, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang berfokus pada sumber daya alam dan sumber daya lainnya, penyusunan Rancangan awal Renja memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Rancangan akhir Renja OPD dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo menyusun Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Awal (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Awal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Boalemo Tahun 2024 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang handal dan berdaya saing khususnya yang akan dilaksanakan tahun 2024.
- b. Sebagai pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Boalemo Tahun 2024 dalam penyusunan RKAP – OPD Tahun 2024
- c. Sebagai tolok ukur OPD / Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan **Bab Pendahuluan** yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan **Bab Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu** yang memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** Merupakan **Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** Merupakan **Bab Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah yang** memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024
dalam kurun waktu 2024

BAB V Merupakan **Bab Penutup**, yang memuat Catatan Penting, Kaidah-
aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-
C.32 dan Tabel T-C.33

BAB II

Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 ditentukan dari hasil kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun sebelumnya (tahun n-1). Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIA N
		2023	2023	2023	2022
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.584.089.632	3.724.598.443	99,28%	99,28%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.659.800	102.483.768	71,34	100
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.659.800	102.483.768	71,34	100
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.049.392.124	2.974.447.893	97,54	99,46%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.392.124	2.974.447.893	97,54	99,46%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.037.708	236.151.212	70,07	99,99%
-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.544.000	212.401.840	68,84	99,99%

-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.493.708	23.749.372	83,35	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000	54.000.000	100,00	
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.000.000	54.000.000	100,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.032.682	334.854.850	76,10	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.544.920	5.995.425	56,86	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	86.344.843	5.995.425	6,94	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.982.919	65.704.000	76,42	96,26
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.160.000	257.160.000	100,00	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.482.600	22.660.720	71,98	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.482.600	22.660.720	71,98	
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.382.307.355	3.346.549.921	98,94	99,92
1	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.329.864.375	3.294.106.941	98,93	99,92

-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	254.864.375	254.864.375	100,00	99,92
-	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.075.000.000	3.039.242.566	98,84	92,91%
2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	52.442.980	52.442.980	100,00	
-	Sub Kegiatan Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil	52.442.980	52.442.980	100,00	
C	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.235.786.535	4.377.084.085	95,24%	95,24%
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.518.617.555	3.845.219.435	95,24%	95,24%
-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.779.244.555	1.506.244.555	84,66	99,94
-	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.739.373.000	2.338.974.880	85,38	86,14
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota	717.168.980	531.864.650	74,16	

-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	717.168.980	531.864.650	74,16	
D	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.937.914.988	1.610.593.246	83,11	83,42
1	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.937.914.988	1.610.593.246	83,11	83,42
-	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.937.914.988	1.610.593.246	83,11	83,42

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam mencapai program dan target yang telah ditetapkan pada RENSTRA.

Pada Tahun 2024 Program yang dilaksanakan tidak lari jauh dari Program yang telah ditentukan pada Renstra 2023-2026, dengan ketambahan dan pemilahan program berdasarkan sasaran dan tujuan masing – masing.

Total belanja program dan kegiatan tahun anggaran 2023 lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo adalah sebesar Rp. 14.611.613.792-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.483.541.629-. Dengan menggunakan format penetapan rencana kerja, pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo sebesar atau 92,28%. Dengan capaian kinerja tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

Berikut lampiran tabel T-C.29 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Boalemo

Dinas Kelautan dan Perikanan

KOD E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keg iatan (output)/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja Capaian Progra m (Renstr a Perangk at Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Targget Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	2Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingka t Realis asi (%) 2023		Realis asi Capaia n Progra m dan Kegiat an s/d Tahun Berjal an (Tahu n n-1) 2024	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra (%)

1	2	3	4	5	6					7	8	9	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERITAHAN DAERAH												
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo												
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik												
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	3.35	%	100	%	3.35	%	100,00 %	100%	100,00	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	0	%	100	%	0	%	0,00%	100%	100	100%
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	0	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	11 Dokumen	11	11 Dokumen

1.03.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0	Lap ora n	4	Dok ume n	0	Lapora n	0,00%	5 Laporan	5	5 Laporan
1.03.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	Dok ume n	4	Dok ume n	0	Dokum en	0,00%	4 Doukmen	4	4 Laporan
1.04.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	0	%	100	%	0	%	0,00%	100%	100,00	100%

1.04.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	36	Orang	36	Orang	36	Orang	100,00 %	36 Orang	36,00	36 Orang
1.03.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	100%	100	%	100	%	100	%	100,00 %	100%	100	100%
1.03.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95	Paket	1	Paket	95	Paket	95	1 Paket	1	1 Paket
1.03.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00	1 Laporan	1	1 Laporan
1.03.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Opd	100%	0	%	100	%	0	%	0,00%	100%	100	100%

1.03.0 1.2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	1 Unit	1	1 Unit
1.03.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	0	%	98	%	0	%	0,00%	100%	100	100%
1.03.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Lap ora n	1	Lapo ran	0	Lapora n	0,00	1 Laporan	12	1 Laporan
1.03.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	Lap ora n	1	Lapo ran	0	Lapora n	0,00	1 Laporan	12	1 Laporan
1.03.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Lap ora n	1	Lapo ran	0	Lapora n	0,00	1 Laporan	12	1 Laporan

1.03.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Lap ora n	1	Lapo ran	0	Lapora n	0,00	1 Laporan	12	1 Laporan
1.03.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	0	%	100	%	0	%	0,00%	100%	100	100%
1.03.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	1 Unit	1	1 Unit
1.03.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	1 Unit	1	1 Unit
01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN												

	Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan												
	Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif												
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	27.359 ton	22.625	Ton	2.928	Ton	22.625	Ton	772,71 %	26.820 Ton	23.098	27.359 Ton
3.25.03.2.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100%	87	%	100	%	87	%	87,00 %	100%	100,00	100%
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	25 Unit	84	Unit	20	Unit	84	Unit	420,00	15 Unit	87	25 Unit
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	25 Unit	87	Unit	20	Unit	87	Unit	435,00	15 Unit	207,00	25 Unit

3.25.0 3.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil yang terbentuk	20%	0	%	20	%	0	%	0,00%	20%	-	25%
3.25.0 3.2.02. 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	0	Orang	20	Orang	0	Orang	0,00	20 Orang	-	20 Orang
3.25.0 4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya yang meningkat hasilnya	2.346 Ton	2.089	Ton	2.500	Ton	2.089	Ton	83,56 %	2.300 Ton	2.197	2.346 Ton
3.25.0 4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan	100%	0	%	100	%	0	%	0,00%	100%	-	100%
3.25.0 4.2.02. 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	0	Kelompok	10	Kelompok	0	Kelompok	0,00	10 Kelompok	-	10 Kelompok

3.25.0 4.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	0	Kelompok	10	Kelompok	0	Kelompok	0,00	10 Kelompok	-	10 Kelompok
3.25.0 4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	50	%	100	%	50	%	50,00 %	100%	98,77	100%
3.25.0 4.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Paket	0	Paket	12	Paket	0	Paket	#REF!	10 Paket	10	14 Paket
3.25.0 4.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Paket	52	Paket	12	Paket	52	Paket	50,00	10 Paket	18	14 Paket
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo													

3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	98,87%	96,92	%	1008,78	%	96,92	%	9,61%	96,93%	100,29	96,93%
		Rata - rata konsumsi ikan masyarakat	46,36 Kg/Kapita/tahun	47,25	Kg/Kapita/Tahun	47,36	Kg/Kapita/Tahun	47,25	Kg/Kapita/Tahun	99,77 %	44,67 Kg/Kapita/tahun	47,72	44,67 Kg/Kapita/tahun
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	100%	20	%	20	%	20	%	100,00 %	100%	100,00	100%
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000 Ton	0	Ton	1500	Ton	0	Ton	0,00	1.500 Ton	26.146	1.500 Ton

3.25.0 6.2.03. 02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	15 Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	100,00	5 Pelaku Usaha	30,00	15 Pelaku Usaha
-------------------------	--	---	----------------	---	----------	---	----------	---	----------	--------	----------------	-------	-----------------



Ir. ASRI UMAR MURAT

**NIP. 19680928 200012 2
006**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dokumen Renstra OPD Dinas Kelautan dan perikanan maka untuk Urusan Pilihan / Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 3 (Tiga) jumlah Sasaran sesuai Renstra OPD 2023-2026 indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2026). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik.

1. Persentase pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo pada awal renstra tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah

Sasaran 2

Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

1. Presentase Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) pada renstra tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2323 Ton.
2. Presentase Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) pada kondisi akhir periode renstra tahun 2023 ditargetkan sebanyak 27.088 Ton.

Sasaran 3

Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo

1. Presentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kondisi awal renstra tahun 2023 ditargetkan sebanyak 97,89%
2. Presentase Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) pada kondisi awal renstra tahun 2023 ditargetkan sebanyak 45,24Kg/Kapita/Tahun

Berikut lampiran tabel T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Boalemo

SKPD : Dinas Kelautan
dan Perikanan

No	Indikator sasaran	SP M/S tan dar Nas ion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n An alis is				
				Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn n)									
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																			
	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERITAHAN DAERAH																			
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo																			
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik																			
I	Nilai Sakip			B	Predi kat	B	Predi kat	BB	Predi kat	BB	Pre dika t	B	Predi kat	B	Pre dika t	B	Pre dika t	B	Predi kat	
I.1	Nilai SAKIP OPD			BB	Predi kat	BB	Predi kat	BB	Predi kat	BB	Pre dika t	B	Predi kat	B	Pre dika t	B	Pre dika t	BB	Predi kat	
I.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BP KP			100	Perse n	100	Perse n	100	Perse n	100	Per sen	100	Perse n	100	Per sen	100	Per sen	100	Perse n	

I.3	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan			80	Perse n	80	Perse n	80	Perse n	80	Per sen	80	Perse n	80	Per sen	80	Per sen	80	Perse n	
I.4	Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)			100	Perse n	100	Perse n	100	Perse n	100	Per sen	100	Perse n	100	Per sen	100	Per sen	100	Perse n	
I.5	Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan			25	Perse n	30	Perse n	35	Perse n	35	Per sen	25	Perse n	25	Per sen	30	Per sen	35	Perse n	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan																				
Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif																				
II	Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang Meningkat			97,89	%	98,87	%	99,86	%	99,86	%	95.94	%	0	%	95.94	%	0	%	
II.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkat Hasilnya			27.088	Ton	27.359	Ton	27.632	Ton	27.632	Ton	23.422	Ton	0	Ton	23.422	Ton	0	Ton	

II. 2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkatkan Hasilnya			2.323	Ton	2.346	Ton	2.369	Ton	2.369	Ton	2.298	Ton	0	Ton	2.298	Ton	0	Ton	
III	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo																			
III. 1	Rata – rata konsumsi ikan masyarakat			45,24	Kg/Kapita/Tahun	46,36	Kg/Kapita/Tahun	47,36	Kg/Kapita/Tahun	47,36	Kg/Kapita/Tahun	47.75	Kg/Kapita/Tahun	0	Kg/Kapita/Tahun	47.75	Kg/Kapita/Tahun	0	Kg/Kapita/Tahun	



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 K. ASRA UMAR MURAT

 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

 NIP. 19680928 200012 2 006

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan Kepala Daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, yang menonjol dan beberapa diantaranya dimuat dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu penambahan armada penangkapan ikan;
2. Masih perlu penambahan alat bantu penangkapan;
3. Keterbatasan permodalan;
4. Kurangnya pemanfaatan lahan potensi perikanan budidaya;
5. Kurangnya intensitas pengawasan *ilegall fishing*;
6. Kapasitas SDM (*skilled, knowledgeable, competent, excellent service mentality*) dimulai dari *front liner* seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan, sampai pada *upper level* seperti pegawai teknis Dinas (*middle management*) yang harus menguasai manajemen sektoral lingkup kelautan dan perikanan, disamping perlu adanya peningkatan profesionalisme, kompetensi, serta etika aparatur pemerintahan sehingga lebih berdaya guna, produktif dan mandiri;
7. Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan kelautan dan perikanan, pelaku usaha yang terkait langsung dengan sektor ini masih belum ikut **“memiliki”**, sehingga kepedulian untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dinilai masih kurang.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Perikanan dimana Dalam rangka Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan sasaran pembangunan yaitu pemerintah daerah melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boalomo 2023 - 2026, sehingga RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 juga merupakan RENJA kesatu dalam tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk pengembangan usaha masyarakat Kelautan dan Perikanan dibutuhkan penambahan armada penangkapan ikan dan.
- b. Untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Oleh karena itu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 bahwa untuk menunjang urusan Kelautan dan Perikana dibutuhkan beberapa program yaitu seperti :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Berikut Lampiran Tabel T.C 31 (Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023)

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Boalemo

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH										
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo										
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik										
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	3.752.020.296,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	3.950.340.700,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	5.299.591	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	70.000.000
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	10.000.000

1.03. 01.2. 01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabup aten Boale mo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapora n	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupa ten Boalem o	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapora n	40.000.00 0
1.03. 01.2. 01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabup aten Boale mo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lapora n	249.591	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupa ten Boalem o	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lapora n	20.000.00 0
1.04. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabu paten Boale mo	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	3.133.585 .298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabup aten Boalem o	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	3.176.531 .269,00

1.04. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	3.133.585.298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	3.176.531.269,00
1.03. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	100%	27.902.526	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	100%	211.000.000
1.03. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.804.526	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000
1.03. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.098.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	186.000.000
1.03. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Opd	100%	72.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Opd	100%	100.000.000

1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	72.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD	100%	460.639.481	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD	100%	166.809.431
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.747.550	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.671.333,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.920.598,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51.809.431
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330.300.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Boalemo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000

1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	52.593.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Boalemo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	45.000.000
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.024.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.569.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000
01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan									

Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif										
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	27.359 ton	131.500.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya	27.088 ton	2.113.080.200,00
3.25.03.2.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100%	6.500.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100%	1.363.080.200,00
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	20 Unit	6.500.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	20 Unit	524.744.821
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	620.575.779,00

3.25. 03.2. 02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Fasilitas dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil yang terbentuk	20%	125.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Fasilitas dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil yang terbentuk	20%	150.000.000
3.25. 03.2. 02.0 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Boalemo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	125.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Boalemo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	50.000.000
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Boalemo	Jumlah produksi perikanan budidaya yang meningkat hasilnya	2.346 Ton	127.750.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Boalemo	Jumlah produksi perikanan budidaya yang meningkat hasilnya	2.323 Ton	2.054.916.850
3.25. 04.2. 02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Boalemo	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan	100%	125.000.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Boalemo	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan	100%	520.000.000
3.25. 04.2. 02.0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	130.000.000
3.25. 04.2. 02.0 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	10 Kelompok	125.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	10 Kelompok	130.000.000

	Pembudi Daya Ikan Kecil		Pengembangan Kelembagaan			Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pengembangan Kelembagaan		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	2.750.000,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	1.274.916.850,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Paket	2.750.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Paket	415.835.359
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Paket	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Paket	609.081.491
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo										

3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Boalemo	Nilai Tukar Nelayan	98,87 %	2.615.000,00	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Boalemo	Nilai Tukar Nelayan	97,89 %	1.168.608.950,00
			Rata - rata konsumsi ikan masyarakat	46,36 Kg/Kapita/tahun				Rata - rata konsumsi ikan masyarakat	45,24 Kg/Kapita/tahun	
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	100%	2.615.000,00	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Boalemo	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	100%	668.608.950,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000 Ton	1.975.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.500 Ton	250.000.000

3.25. 06.2. 03.0 2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	15 Kelompok	640.000,00	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Boalemo	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Kelompok	418.608.950,00
-----------------------------	--	-------------------	---	----------------	------------	--	-------------------	---	----------------	----------------

KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOALEMO



ASRA UMAR MURAT
PENINJAU MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kabupaten Boalemo.

Dari hasil penelaahan dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pengadaan Perahu
2. Pengadaan Perahu Fiber
3. Pengadaan Mesin Katinting
4. Pengadaan Kapal

Untuk usulan pengadaan Perahu, Pengadaan Perahu Fiber dan Pengadaan Mesin Katinting telah diakomodir di APBD induk pada APBD dan untuk usulan pengadaan Kapal adalah wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2024.

Berikut lampiran tabel T-C.32 (Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024)

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA	KINERJA TAHUNAN 2025(TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11					
			Urusan Pilihan											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
A			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya			27.359	Ton	2.113.080.200	DAU / DAK		27.632	Ton	2.621.522.529

	1		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya			100	%	1.363.080.200	DAU /DAK		100	%	1.871.522.529
	1, 1		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			20	Unit	524.744.821	DAU	Pengadaan Perahu Fiber		Unit	735.761.264

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
GABORON
JALAN
100
JEMBO
Ir. ASKA UMAN MURAT
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo selama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2023-2026

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.	
Sasaran Strategis 1 :	
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	1. Nilai SAKIP OPD
	2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
	3. Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
	4. Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
	5. Persentase Penerimaan PAD
	6. Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran Strategis 2 :	
Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkatkan Hasilnya (Ton)
	2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Meningkatkan Hasilnya (Ton)
Sasaran Strategis 3 :	
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo	1. Nilai Tukar Nelayan yang Meningkat (NTN)
	2. Rata – rata Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)

Sedangkan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo
2. Peningkatan Agrobisnis Sektor Kelautan dan Perikanan

3.1.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan public
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo

3.2. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023;
3. Pendayagunaan dan pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
4. Penerapan kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
5. Fokus Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2023; dan
6. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan yang dihasilkan melalui Musrenbang.

Terdapat 5 (Lima) program, 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, terdiri dari:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
5. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
6. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang budidaya Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

D. Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

3.3. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Serta Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi

Gorontalo

Analisis Renstra Kementerian Lembaga dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaannya dengan Renstra Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Boalemo. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan

pembudidayaan ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun-tahun sebelumnya, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para Masyarakat Kelautan dan Perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur Usaha Kelautan dan Perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* dan sebagai *prime mover* perekonomian nasional. Disamping itu, KKP telah melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program

Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 2021 sesuai target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Boalemo**

Dinas Kelautan dan Perikanan

KO DE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output)/ Sub Kegiatan (Keluaran)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			Lokasi	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	Catat an Penti ng	Targge t Progra m dan Kegiat an (Renja Peran gkat Daera h Tahun	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6						8

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH										
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo										
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan public										
1.03 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Boalemo	100	%	3.950.340.700,00	DAU		100%	3.950.340.700,00
1.03 .01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Kabupaten Boalemo	100	%	70.000.000	DAU		100%	70.000.000
1.03. 01.2. 01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Boalemo	11	Dokumen	10.000.000	DAU		8 Dokumen	10.000.000

1.03. 01.2. 01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Boalemo	5	Laporan	40.000.000	DAU		5 Laporan	40.000.000
1.03. 01.2. 01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Boalemo	4	Dokumen	20.000.000	DAU		4 Laporan	20.000.000
1.04 .01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kabupaten Boalemo	100	%	3.176.531.269,00	DAU		100%	3.176.531.269,00
1.04. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Boalemo	36	Orang	3.176.531.269,00	DAU		36 Orang	3.176.531.269,00

1.04 .01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan perangkat daerah	Kabupaten Boalemo	12	Dokume n	150.000.000	DAU		12 Dokum en	150.000.000
1.04. 01.2. 04.0 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kabupaten Boalemo	12	Dokume n	150.000.000	DAU		12 Dokum en	150.000.000
1.03 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Boalemo	100	%	31.000.000	DAU		100%	31.000.000
1.03. 01.2. 05.0 2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Boalemo	1	Paket	21.000.000	DAU		70 Paket	21.000.000
1.03. 01.2. 05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Boalemo	3	Orang	10.000.000	DAU		2 Orang	10.000.000

		Kantor								
1.03. .01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	Kabupaten Boalemo	100	%	211.000.000	DAU		100%	211.000.000
1.03. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	25.000.000
1.03. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten & Luar Daerah	1	Laporan	186.000.000	DAU		1 Lapora n	186.000.000

1.03 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Opd	Kabupaten Boalemo	100	%	100.000.000	DAU		100%	100.000.000
1.03. 01.2. 07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 07.0 2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Unit	50.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
1.03. 01.2. 07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	20.000.000
1.03. 01.2. 07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	20.000.000

1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Kabupaten Boalemo	100	%	166.809.431	DAU		100%	166.809.431
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Boalemo	1	Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Laporan	90.000.000	DAU		1 Laporan	90.000.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Laporan	51.809.431	DAU		1 Laporan	51.809.431
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Boalemo	1	Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	20.000.000

1.03. .01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Kabupaten Boalemo	100	%	45.000.000	DAU		100%	45.000.000
1.03. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.0 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000

1.03. 01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
1.03. 01.2. 09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		100%	5.000.000
1.03. 01.2. 09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Boalemo	1	Unit	5.000.000	DAU		100%	5.000.000
01.0 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang berkelanjutan									

Meningkatnya agribisnis secara terpadu dan kompetitif										
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Meningkat Hasilnya	Kabupaten Boalemo	27.359	Ton	2.549.489.642,29	DAU/D AK		27.632 ton	2.621.522.529,38
3.25.03.2.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kabupaten Boalemo	100	%	1.849.489.642,29	DAU/D AK		100%	1.871.522.529,38
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Boalemo	15	Unit	724.744.821	DAU		20 Unit	735.761.264
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kabupaten Boalemo	15	Unit	924.744.821,29	DAK		20 Unit	935.761.265,38

3.25 .03. 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas dan pengembangan lembaga usaha kelompok nelayan kecil yang terbentuk	Kabupaten Boalemo	20	%	100.000.000	DAU		20%	150.000.000
3.25. 03.2. 02.0 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Boalemo	20	Orang	50.000.000	DAU		20 Orang	50.000.000
3.25. 03.2. 02.0 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kabupaten Boalemo	3	Kelompok	50.000.000	DAU		3 Kelompok	50.000.000
3.25. 03.2. 02.0 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Boalemo	2	Unit Usaha	50.000.000	DAU		2 Unit Usaha	50.000.000
3.25 .03. 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kabupaten Boalemo	100	%	150.000.000	DAU		100%	150.000.000

3.25. 03.2. 03.0 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokum en	50.000.000
3.25. 03.2. 03.0 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Boalemo	3	Layanana	100.000.000	DAU		3 Layana n	100.000.000
3.25 .03. 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kabupaten Boalemo	100	%	150.000.000	DAU		100%	150.000.000
3.25. 03.2. 04.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokum en	50.000.000

3.25. 03.2. 04.0 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kabupaten Boalemo	1	Rekomendasi	100.000.000	DAU		1 Rekomendasi	100.000.000
3.25. 03. 2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kabupaten Boalemo	100	%	150.000.000	DAU		100%	150.000.000
3.25. 03.2. 05.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000

3.25. 03.2. 05.0 2	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kabupaten Boalemo	1	Rekomen dasi	100.000.000	DAU		1 Rekome ndasi	100.000.000
3.25 .03. 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kabupaten Boalemo	100	%	150.000.000	DAU		100%	150.000.000
3.25. 03.2. 06.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokum en	50.000.000

3.25. 03.2. 06.0 2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Kabupaten Boalemo	1	Rekomen dasi	100.000.000	DAU		1 Rekome ndasi	100.000.000
3.25 .04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya yang meningkat hasilnya	Kabupaten Boalemo	2.34 6	Ton	2.440.981.325	DAU/D AK		2.369 Ton	2.461.670.719
3.25 .04. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Boalemo	100	%	130.000.000	DAU		100%	130.000.000

3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang budidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Kabupaten Boalemo	55	Dokumen	130.000.000	DAU		65 Dokumen	130.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan	Kabupaten Boalemo	100	%	520.000.000	DAU		100%	520.000.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kabupaten Boalemo	15	Kelompok	130.000.000	DAU		20 Kelompok	130.000.000

3.25. 04.2. 02.0 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kabupaten Boalemo	15	Kelompok	130.000.000	DAU		20 Kelomp ok	130.000.000
3.25. 04.2. 02.0 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya	Kabupaten Boalemo	15	Kelompok	130.000.000	DAU		20 Kelomp ok	130.000.000
3.25. 04.2. 02.0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Boalemo	15	Kelompok	130.000.000	DAU		20 Kelomp ok	130.000.000
3.25 .04. 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Fasilitas penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Kabupaten Boalemo	100	%	130.000.000	DAU		100%	130.000.000

3.25. 04.2. 03.0 2	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	25	Dokumen	130.000.000	DAU		35 Dokum en	130.000.000
3.25 .04. 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Boalemo	100	%	1.660.981.325, 18	DAU/D AK		100%	1.681.670.719, 38
3.25. 04.2. 04.0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	14	Paket	605.490.662	DAU		16 Paket	615.835.359
3.25. 04.2. 04.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	14	Paket	805.490.663	DAK		16 Paket	815.835.360,38
3.25. 04.2. 04.0 6	Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Boalemo	14	Kelompok	250.000.000	DAU		16 Kelomp ok	250.000.000

3.25.05	Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan angka pelanggaran	Kabupaten Boalemo	100	%	100.833.807.807,15	DAU		100%	101.688.459,49
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan	Kabupaten Boalemo	1	Laporan	100.833.807.807,15	DAU		1 Laporan	101.688.459,49
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	100.833.807.807,15	DAU		1 Dokumen	101.688.459,49
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi ikan kabupaten boalemo										
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Kabupaten Boalemo	98,87	%	1.158.787.250,00	DAU/D AK		99,86 %	1.168.608.950,00

		Rata – rata konsumsi ikan masyarakat		46,36	Kg/Kapita/Tahun				47,36 Kg/Kapita/tahun	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan Skala Mikro	Kabupaten Boalemo	100	%	200.000.000	DAU		100%	200.000.000
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Boalemo	1	Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	Kabupaten Boalemo	100	%	300.000.000	DAU		100%	300.000.000

3.25. 06.2. 02.0 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Boalemo	10	Unit	300.000.000	DAU		15 Unit	300.000.000
3.25 .06. 2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran bahan baku pengolahan ikan	Kabupaten Boalemo	100	%	658.787.250,00	DAU/D AK		100%	668.608.950,00
3.25. 06.2. 03.0 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Boalemo	2.000	Ton	250.000.000	DAU		2.500 Ton	250.000.000

3.25. 06.2. 03.0 2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kabupaten Boalemo	15	Pelaku Usaha	408.787.250,00	DAU/D AK	25 Kelomp ok	418.608.950,00
						110.933.406.7 25			10.303.831.358


PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BOALEMO
DR. ASRAH MAR MURAT
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19680928 200012 2 006

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai pedoman awal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program / kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rancangan akhir RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Rancangan awal RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Sekian dan terima kasih

Tilamuta, 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Boalemo,



ASRA UMAR MURAD
NIP. 19680928 200012 2 006